EVALUASI PELAKSANAAN PENGUATAN PERMODALAN KOPERASI DI KOTA PAYAKUMBUH

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan Sarjana Pendidikan Strata satu (S1)

Oleh :

SHERLY TIARA DEWI
55329/2010

PROGRAM STUDI SOSIOLOGI ANTROPOLOGI

JURUSAN SOSIOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2014

PERSETUJUAN SKRIPSI

JuduL	**: Evaluasi Pelaksanaan Penguatan Permodalan Koperasi di Kota Payakumbuh**
Nama	**: Sherly Tiara Dewi**
NIM/TM	**: 55329/2010**
Program Studi	**: Pendidikan Sosiologi Antropologi**
Jurusan	**: Sosiologi**
Fakultas	**: Ilmu Sosial**

Padang, Agustus 2014

Disetujui Oleh:

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Dr. Erianjoni, S.Sos., M.Si	**Ike Sylvia, S.IP., M.Si**
NIP: 19740228 200112 1 002	**NIP: 19770608 200501 2 002**

Mengetahui:
Dekan FIS Universitas Negeri Padang

Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd
NIP: 19621001 198903 1 002

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Pendidikan Sosiologi Antropologi
Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang
Pada Tanggal 15 Juli 2014

JuduL	**: Evaluasi Pelaksanaan Penguatan Permodalan Koperasi di Kota Payakumbuh**
Nama	**: Sherly Tiara Dewi**
NIM/TM	**: 55329/2010**
Program Studi	**: Pendidikan Sosiologi Antropologi**
Jurusan	**: Sosiologi**
Fakultas	**: Ilmu Sosial**

Padang, Agustus 2014

Tim Penguji

	Nama	**Tanda Tangan**
1. Ketua	**: Dr. Erianjoni, S.sos., M.Si**	**1.**
2. Sekretaris	**: Ike Sylvia, S.IP., M.Si**	**2.**
3. Anggota	**: Junaidi, S.Pd., M.Si**	**3.**
4. Anggota	**: Nora Susilawati, S.sos., M.Si**	**4.**
5. Anggota	**: Drs. Gusraredi**	**5.**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Sherly Tiara Dewi
NIM/TM	:	55329/2010
Program Studi	:	Pendidikan Sosiologi-Antropologi
Jurusan	:	Sosiologi
Fakultas	:	Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan, bahwa skripsi saya dengan judul **"Evaluasi Pelaksanaan Penguatan Permodalan Koperasi di Kota Payakumbuh"** adalah benar merupakan hasil karya saya dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku, baik di Institusi UNP maupun di masyarakat dan Negara.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Diketahui oleh,
Ketua Jurusan Sosiologi

Adri Febrianto, S.Sos., M.Si
NIP. 19680228 199903 1 001

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
362E7ACF412984213
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

Sherly Tiara Dewi
NIM: 55329/2009

ABSTRAK

Sherly Tiara Dewi (55329/2010). Evaluasi Pelaksanaan Penguatan Permodalan Koperasi di Kota Payakumbuh.

Program Dana Bergulir Penguatan Permodalan yang dilaksanakan di Kota Payakumbuh dicanangkan untuk membantu memperkuat modal usaha KUMKM di Kota Payakumbuh. Selama pelaksanaannya, program ini mengalami berbagai kendala, seperti kendala pada proses pemanfaatan dan pengembalian pinjaman oleh koperasi peminjam di Kota Payakumbuh. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan tentang evaluasi pelaksanaan pemanfaatan dan pengembalian program bantuan dana penguatan permodalan oleh koperasi.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Mentalitas yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat. Koentjaraningrat mengatakan bahwa 84% penduduk Indonesia memiliki sikap mental petani, yang dikemukakan dalam beberapa kerangka yaitu: sikap mental petani dalam aspek waktu (MW). Sikap mental petani Indonesia terhadap alam (MA), sikap mental petani Indonesia yaitu hubungannya terhadap sesama manusia (MM), serta sikap mental petani Indonesia mengenai hakekat dari hidup dan karya manusia (MH-MK).

Jenis penelitian adalah penelitian evaluatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposi*ve *Sampling* (sampel bertujuan) dimana sampel ditetapkan secara sengaja oleh peneliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Agar data pada penelitian ini valid, peneliti menggunakan teknik triangulasi data yaitu memberikan pertanyaan yang sama kepada informan yang berbeda. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data (*flow model*) yang dikemukakan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman.

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa pada pelaksanaan pemanfaatan masih terdapat koperasi peminjam yang tidak memanfaatkan pinjamannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, yaitu masih terdapat peminjam dimana pinjamannya dimanfaatkan oleh orang lain. Selain itu, pada pelaksanaan pengembalian pinjaman oleh koperasi peminjam kepada UPTD penanggung jawab program masih terdapat koperasi peminjam yang tidak mengembalikan pinjaman sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari 26 koperasi peminjam yang tercatat pada tahun 2013 terdapat 18 koperasi yang bermasalah dalam mengembalikan pinjaman atau sekitar 69,1% dari seluruh koperasi peminjam bantuan program dana bergulir penguatan permodalan koperasi di Kota Payakumbuh.

Kata kunci: Evaluasi, program Dana Bergulir

KATA PENGANTAR

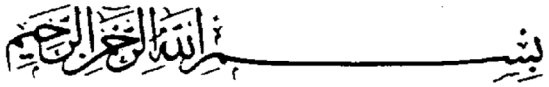

Alhamdulillah berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan di Jurusan Pendidikan Sosiologi Antropologi Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Padang (UNP). Skripsi ini berjudul **"Evaluasi Pelaksanaan Penguatan Permodalan Koperasi di Kota Payakumbuh"**. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan pendidikan strata satu (S1).

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bimbingan, bantuan, saran serta menerima sumbangan pemikiran dari berbagai pihak baik secara langsung maupun yang tidak langsung, maka perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Erianjoni, S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing I dan Ibu Ike Sylvia, S.IP., M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah tulus memberikan masukan, bantuan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Drs. Gusraredi, Bapak Junaidi, S.Pd., M.Si dan Ibu Nora Susilawati, S.Sos., M.Si sebagai dosen penguji yang telah memberikan masukan dan saran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Bapak Adri Febrianto, S.Sos., M.Si sebagai dosen Pembimbing Akademik dan ketua Program Studi Pendidikan Sosiologi Antropologi

serta Ibu Nora Susilawati S,Sos, M.Si selaku sekretaris Program Studi Pendidikan Sosiologi Antropologi yang telah memberikan bantuan demi kelancaran penulisan skripsi ini.

4. Seluruh staf kantor UPTD Fasilitasi Pembiayaan Kota Payakumbuh yang telah memberikan bantuan demi kelancaran penulisan skripsi ini.
5. Seluruh staf kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Payakumbuh yang telah membantu memperlancar proses administrasi demi kelancaran penulisan skripsi ini.
6. Ayahanda Con Hendri dan Ibunda Alfitriza beserta Keluarga Besar tercinta yang telah memberi semangat, kekuatan dan do'a dalam penulisan skripsi ini.
7. Semua informan yang telah senang hati menyisihkan waktu untuk melakukan wawancara dengan peneliti.
8. Sahabat ku Decky Alfando Pratama A.md dan kakak angkat ku tersayang Arwini Safrida dan Riki Shaputra yang telah banyak memberikan bantuan, dorongan semangat, petunjuk dan saran dalam penulisan skripsi ini.
9. Rekan–rekan seperjuangan di jurusan Sosiologi BP 2010, khususnya buat sahabatku Devi Monica, Indah Purnama Sari, Ria Hudriany, Armiati Erza (Sosant 11) dan semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyelesaian skripsi ini .

Semoga bimbingan dan bantuan yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Sebagai peneliti pemula,

penulis menyadari banyak terdapat kesalahan dan kekhilafan dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu, penulis mengharapkan masukan berupa kritikan maupun saran yang membangun dari segenap pembaca demi penyempurnaan skripsi ini.

Atas saran dan kritikan dari pembaca, penulis ucapkan semoga semua yang telah dilakukan menjadi ibadah dan diberi balasan yang berlipat ganda oleh Allah SWT. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca di masa yang akan datang, khususnya mahasiswa program studi Sosiologi Antropologi Universitas Negeri Padang.

Padang, Juli 2014

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI v

DAFTAR TABEL viii

DAFTAR GAMBAR x

DAFTAR LAMPIRAN xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Batasan Masalah 12

C. Rumusan Masalah 12

D. Tujuan Penelitian 13

E. Manfaat Penelitian 13

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Evaluasi Program 14

B. Teori Mentalitas 18

C. Program Dana Bergulir Penguatan Permodalan di Kota Payakumbuh 20

D. Studi Relevan 24

E. Kerangka Konseptual 25

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 27

B. Lokasi Penelitian 28
C. Informan Penelitian 28
D. Jenis dan Sumber Data 29
E. Teknik Pengumpulan Data 30
1. Observasi 30
2. Wawancara 31
3. Studi Dokumentasi 33
F. Triangulasi Data 34
G. Analisis Data 34
a. Reduksi Data 34
b. Penyajian Data 36
c. Menarik kesimpulan/Verifikasi 36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian 38
1. Gambaran umum Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Fasilitasi Pembiayaan Kota Payakumbuh 38
2. Gambaran umum dana bergulir penguatan permodalan di Kota Payakumbuh 57
3. Koperasi di Kota Payakumbuh 60
B. Pembahasan
1. Evaluasi Pemanfaatan dana bergulir penguatan permodalan di Kota Payakumbuh 74
(a) Evaluasi keberhasilan pelaksanaan pemanfaatan

dana bergulir 74

(b) Evaluasi kegagalan pelaksanaan pemanfaatan dana bergulir 93

2. Evaluasi Pengembalian dana bergulir penguatan permodalan di Kota Payakumbuh 96

(a) Evaluasi keberhasilan pelaksanaan pengembalian dana bergulir 96

(b) Evaluasi kegagalan pelaksanaan pengembalian dana bergulir 101

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 120

B. Saran 121

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

1. Anggaran APBD Dana Bergulir tahun 2002-2013 7
2. Koperasi peminjam Dana Bergulir 9
3. Perkembangan jumlah koperasi (tahun 2010-2012) 61
4. Perkembangan anggota koperasi (tahun 2010-2012) 62
5. Volume usaha koperasi (tahun 2010-2012) 62
6. Koperasi Unit Desa (KUD) 62
7. Koperasi Peternak Sapi 63
8. Koperasi Wanita 63
9. Koperasi Angkutan Darat 63
10. Koperasi Tani 64
11. Koperasi Pebabri 65
12. Koperasi Serba Usaha 65
13. Koperasi Wredatama 67
14. Koperasi Pegawai Negeri/KPN 67
15. Koperasi Karyawan 69
16. Koperasi Veteran 70
17. Koperasi Pondok Pesantren 70
18. Koperasi Pasar 70
19. Koperasi Simpan Pinjam 70
20. Koperasi Kepolisian 71

21. Koperasi Pedagang Kaki Lima 71

22. Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah 71

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Halaman**

1. Kerangka Konseptual 27

2. Model Analisis Data *Flow Model* 38

LAMPIRAN

Lampiran

1. Pedoman wawancara
2. Daftar informan penelitian
3. Dokumentasi penelitian
4. Surat izin penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial (FIS)
5. Surat rekomendasi tentang izin pelaksanaan penelitian
6. Surat keterangan telah selesai melaksanakan penelitian
7. Format Surat perjanjian pinjaman program dana bergulir penguatan permodalan
8. Penetapan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Fasilitasi Pembiayaan Kota Payakumbuh
9. Struktur organisasi UPTD Fasilitasi Pembiayaan Kota Payakumbuh
10. Data Pejabat pengelola dan petugas teknis UPTD Fasilitasi Pembiayaan Kota Payakumbuh

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah selama ini telah banyak melakukan berbagai upaya untuk memberdayakan masyarakat di berbagai bidang agar terbebas dari kemiskinan. Sejak tahun 1968 sampai saat ini, usaha-usaha tersebut terwujud dalam berbagai program (Setiadi, 2011:820-832) seperti: program Inpres Desa Tertinggal (IDT), program BOS (Bantuan Operasional Sekolah), program pendidikan nonformal kesetaraan paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA, program Askeskin (Asuransi Kesehatan bagi Masyarakat Miskin), program perumahan swadaya (Rusunawa), program Keluarga Harapan (PKH), program Raskin (Beras untuk Keluarga Miskin), PNPM-MP (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan), program KUR (Kredit Usaha Rakyat), program Bantuan Langsung Tunai (BLT) serta program dana bergulir penguatan permodalan KUMKM (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) (Badan Layanan Umum Daerah Kota Payakumbuh).

Program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah di atas, salah satunya bertujuan untuk perekonomian, khususnya dalam membantu permodalan. Kebijakan di bidang penanaman modal diarahkan untuk semakin mendorong penanaman modal, baik modal asing maupun modal dalam negeri, dalam rangka memacu pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam kegiatan ekonomi, serta memperluas kesempatan

usaha dan lapangan kerja. Kebijaksanaan penanaman modal ini diarahkan pada sektor-sektor usaha yang produktif, menyerap banyak tenaga kerja, serta berorientasi pada ekspor (Tjiptoherijanto, 1997:3).

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Payakumbuh berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 43 tahun 2013 melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Fasilitasi Pembiayaan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dana bergulir penguatan permodalan usaha mikro dan kecil di Kota Payakumbuh. Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 19 tahun 2006 penguatan permodalan merupakan Kegiatan Pemberdayaan Koperasi, Usaha mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) oleh Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan memberikan dana penguatan dalam bentuk dana bergulir kepada KUMKM di kawasan industri. Dana tersebut digunakan untuk keperluan investasi dan atau modal kerja yang penyalurannya dilaksanakan oleh Lembaga Keuangan Pelaksana. Dana bergulir penguatan modal usaha mikro dan kecil adalah dana milik pemerintah daerah yang bersumber dari APBD yang disalurkan kepada usaha mikro dan kecil dalam bentuk pinjaman dan ditagih kembali untuk digulirkan kembali kepada usaha mikro dan kecil lainnya yang membutuhkan.

Berdasarkan Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Nomor 010 tahun 2011, usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000

(lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta (2) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). Sedangkan usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Kriteria usaha kecil yaitu: (1) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta (2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang perorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.

Tujuan penguatan permodalan adalah mengembangkan dan mendorong KUMKM agar mampu bersaing dan dapat meningkatkan usahanya, menfasilitasi dan menstimulasi pengembangan pembiayaan KUMKM untuk modal kerja dan investasi, meningkatkan produktivitas dan jangkauan pemasaran KUMKM serta membantu program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan dan pengangguran. Adapun manfaat dari penguatan permodalan ini menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan

UKM Nomor 19 tahun 2006 yaitu: (1) Terelokasinya usaha KUMKM yang mempunyai potensi untuk berkembang, dari luar kawasan industri ke dalam kawasan industri tertentu dalam rangka lebih memudahkan usaha KUMKM tersebut untuk kesesuaian tata ruang, kelestarian lingkungan hidup, mendapatkan jaminan bahan baku, proses produksi, transportasi dan distribusi serta akses pasar atas produk-produk yang dihasilkan, (2) meningkatkan usaha KUMKM dalam kawasan industri, dicirikan dengan meningkatkan kapasitas dan kualitas produk, perluasan pemasaran serta penyerapan tenaga kerja, dan (3) meningkatkan jumlah KUMKM yang memiliki potensi untuk berkembang di dalam kawasan industri.

Sasaran penerima bantuan dana bergulir penguatan permodalan berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 11 tahun 2013 yaitu: (1) usaha pertanian, usaha peternakan seperti ternak ayam potong dan ternak ayam arab, dan usaha perikanan, (2) usaha perdagangan seperti pedagang kue, pedagang harian, pedagang sepatu, pedagang makanan olahan, pedagang beras dan telur, pedagang kayu dan pasir, pedagang kosmetik, pedagang hasil tani, pedagang keliling, pedagang tekstil, dan pedagang elektronik, (3) usaha industri kecil dan rumah tangga seperti industri sanjai, industri makanan ringan, industri kue, industri kerupuk kulit, industri batu bata, dan industri tahu (4) usaha jasa, (5) usaha ekonomi rakyat, (6) lembaga ekonomi mikro dan kecil lainnya seperti percetakan, warnet dan counter, pencucian mobil, menjahit pakaian, dan reparasi jam.

Program dana bergulir penguatan permodalan di Kota Payakumbuh telah terlaksana sejak tahun 2002, awalnya adalah dalam rangka pengelolaan Program Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan atau yang disebut PER. Pelaksanaan penyaluran dana bergulir penguatan permodalan ini bekerja sama dengan Bank Nagari dan pinjaman hanya diberikan kepada peminjam yang termasuk ke dalam kriteria usaha mikro. Selama perjalanannya, program PER berkembang menjadi program jangka panjang daerah. Pada tahun 2003 dibentuklah Badan Pengelola Dana Bergulir (BPDB) melalui peraturan Walikota Nomor 29 tahun 2003. Sepanjang tahun 2002 sampai 2007 dana bergulir penguatan permodalan KUMKM diambil dari APBD kota Payakumbuh. Selain itu, KUMKM tidak perlu menyerahkan jaminan atau agunan kepada unit pelaksana bantuan dana bergulir ini. KUMKM yang mendapatkan bantuan dana penguatan permodalan dikenakan jasa atau bunga sebesar 8% s/d 10% per tahun.

Keluarnya Permendagri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pada tahun 2008 Badan Pengelola Dana Bergulir (BPDB) berubah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) melalui Peraturan Walikota Nomor 14 tahun 2008 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dana bergulir penguatan modal usaha mikro Kota Payakumbuh. Dengan dibentuknya BLUD, proses pelaksanaan bantuan dana bergulir ini diikat oleh berbagai aturan salah satunya yaitu peminjam dana penguatan permodalan ini harus memberikan jaminan atau agunan sebagai syarat untuk meminjam. Selain itu, jasa yang harus

dibayar oleh KUMKM lebih kecil yaitu sebesar 6%. Selama tahun 2008-2012 pelaksanaan bantuan dana penguatan permodalan ini berada di bawah wewenang sekretariat daerah bagian perekonomian. Jasa yang diterima selain untuk biaya operasional juga diserahkan ke kas daerah yang disebut PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Payakumbuh dengan jumlah yang ditentukan berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh. Pada tahun 2013 berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 11 ditetapkanlah UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) di bawah wewenang Dinas Pendapatan, Fasilitasi Pembiayaan Kota Payakumbuh.

Berikut ini merupakan jumlah bantuan dana bergulir penguatan permodalan selama tahun 2002-2013 di Kota Payakumbuh.

Tabel 1
Anggaran APBD Dana Bergulir Penguatan Permodalan KUMKM
UPTD Fasilitasi Pembiayaan Kota Payakumbuh
Tahun 2002-2013

No	Periode	Jumlah dana (RP)
1.	APBD tahun 2002	471. 212. 081,00
2.	APBD tahun 2003	2. 170. 000. 000,00
3.	APBD tahun 2004	1. 500. 000. 000,00
4.	APBD tahun 2005	4. 000. 000. 000,00
5.	APBD tahun 2006	5. 000. 000. 000,00
6.	APBD tahun 2007	6. 000. 000. 000,00
7.	APBD tahun 2008	19. 541. 212. 081,00
8.	APBD tahun 2009	11. 671. 035. 341,00
9.	APBD tahun 2010	11. 103. 850. 000,00

10.	APBD tahun 2011	17. 727. 975. 978,00
11.	APBD tahun 2012	17. 152. 386. 616,00
12.	APBD tahun 2013	23. 081. 266. 600,00

Sumber : Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Fasilitasi Pembiayaan Kota Payakumbuh

Berdasarkan wawancara awal peneliti dengan Bu Mega yang merupakan salah satu staf kantor UPTD Fasilitasi Pembiayaan Kota Payakumbuh, ternyata terdapat permasalahan dalam pelaksanaan bantuan dana bergulir penguatan permodalan KUMKM pada tahun 2013. Selama pelaksanaannya masih terdapat peminjam yang macet dan menunggak pada proses pengembalian dana yang telah dipinjam. Menurut beliau peminjam yang macet yaitu peminjam yang berstatus koperasi, sedangkan peminjam yang menunggak merupakan peminjam yang memiliki usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain itu, menurut Bu Mega juga terdapat peminjam yang memanfaatkan pinjamannya tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh UPTD Fasilitasi Pembiayaan Kota Payakumbuh pada petunjuk teknis pelaksanaan program penguatan permodalan. Menurut beliau pada tahun 2013 tercatat bahwa peminjam yang berstatus koperasi dan kelompoklah yang banyak mengalami permasalahan. Berdasarkan data yang ada di kantor UPTD Fasilitasi Pembiayaan Kota Payakumbuh, terlihat bahwa koperasi dan kelompok mendapatkan pinjaman yang lebih besar dibandingkan dengan peminjam yang memiliki usaha mikro dan kecil.

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara awal dengan beberapa koperasi yang tercatat sebagai peminjam dana penguatan permodalan di Kota

Payakumbuh. Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Datuak Gadiang sebagai penanggung jawab Koperasi Tani (Koptan) Bungo Saiyo yang tergolong sebagai peminjam dengan kriteria pengembalian pinjaman yang lancar. Koptan Bungo Saiyo berada di Kelurahan Kubu Gadang Barat Kota Payakumbuh. Koperasi ini mendapatkan pinjaman sebesar Rp 200.000.000 pada tanggal 10 Mei 2011. Koptan Bungo Saiyo memanfaatkan pinjamannya untuk usaha bibit coklat, penjualan pupuk, dan usaha simpan pinjam. Bapak Datuak Gadiang terlebih dahulu mengikuti prosedur peminjaman yang telah ditetapkan oleh UPTD Fasilitasi Pembiayaan Kota Payakumbuh untuk mendapatkan pinjaman, dan pinjaman tersebut dikembalikan dalam jangka waktu 3 tahun.

Selain dengan Bapak Datuak Gadiang, peneliti juga melakukan wawancara awal dengan Bapak Darwena sebagai penanggung jawab Koperasi BDS Sampurna 1 yang tergolong peminjam dengan kriteria pengembalian pinjaman yang macet. Koperasi BDS Sampurna 1 berada di Kelurahan Bulakan Balai Kandi Kota Payakumbuh, koperasi ini mendapatkan pinjaman sebesar Rp 462.500.000 pada tanggal 4 November 2003. Koperasi BDS Sampurna 1 memanfaatkan pinjamannya untuk menambah modal usaha kerupuk yang ia kelola dan usaha simpan pinjam. Sama hal nya dengan Bapak Datuak Gadiang, Bapak Darwena terlebih dahulu mengikuti prosedur peminjaman yang telah ditetapkan oleh UPTD Fasilitasi Pembiayaan Kota Payakumbuh untuk mendapatkan pinjaman, dan pinjaman tersebut juga dikembalikan dalam jangka waktu 3 tahun.

Berikut ini merupakan data koperasi peminjam bantuan dana penguatan permodalan di Kota Payakumbuh pada tahun 2013.

Tabel 2
Koperasi Peminjam Dana Bantuan Penguatan Permodalan di Kota Payakumbuh

No	Nama koperasi	Kelurahan	Realisasi	Pinjaman (Rp)	Cicilan per bulan	Status
1.	BDS Sampurna I	Bulakan Balai Kandi	4 November 2003	500.000.000	15.280.000	Macet
2.	Koptan Bakung Jaya	Koto Panjang Lampasi	13 November 2003	50.000.000	1.528.000	Macet
3.	Koptan Tunas Muda	Koto Panjang Lampasi	5 Desember 2003	100.000.000	3.556.000	Macet
4.	Koptan Pajak Ngalau	Balai Panjang	21 Desember 2003	50.000.000	1.528.000	Macet
5.	BDS Sampurna II	Bulakan Balai Kandi	2 Maret 2004	150.000.000	4.528.000	Macet
6.	BDS Sampurna III	Bulakan Balai Kandi	19 Oktober 2004	400.000.000	12.223.000	Macet
7.	BDS Sampurna IV	Bulakan Balai Kandi	20 Desember 2004	400.000.000	12.223.000	Macet
8.	Koperasi Angkutan Sago	Pasar Payakumbuh	Tahun 2006	150.000.000	4.528.000	Macet
9.	Koperasi Pantai Cermin	Parambahan	Tahun 2006	100.000.000	3.556.000	Macet
10.	Koperasi SMK Kosgoro	Parak Betung	Tahun 2006	100.000.000	3.556.000	Macet

11.	KSU Saiyo Sakato	Parambahan	Tahun 2007	100.000.000	3.556.000	Macet
12.	Koperasi Karya Madani	Payolansek	Tahun 2008	200.000.000	6.112.000	Macet
13.	KSU Simabur	Tanjung Pauh	4 Agustus 2008	100.000.000	3.556.000	Macet
14.	KSU APKL Mandiri	Pasar Payakumbuh	16 September 2008	500.000.000	15.280.000	Macet
15.	KSU Harapan Baru	Talawi	21 Desember 2009	300.000.000	9.139.000	Macet
16.	Koptan Maju Jaya	Limbukan	7 Mei 2010	100.000.000	3.556.000	Macet
17.	KUD Pelita	Koto Baru Payobasung	23 Juni 2010	100.000.000	3.556.000	Macet
18.	Koptan Bungo Saiyo	Kubu Gadang Barat	10 Mei 2010	200.000.000	6.112.000	Lancar
19.	Koperasi Jaya Bersama	Payobasung	4 Agustus 2011	150.000.000	4.528.000	Lancar
20.	KUD Setia Mulia	Koto Panjang Lampasi	4 November 2011	200.000.000	6.112.000	Macet
21.	Koperasi Wredatama	Koto Baru	15 Maret 2012	200.000.000	6.112.000	Lancar
22.	KUD Koto Nan Gadang	Balai Gurun	22 Maret 2012	200.000.000	6.112.000	Lancar
23.	KPN Dian	Balai Kota Payakumbuh	29 Maret 2012	125.000.000	3.8.12.000	Lancar
24.	Koperasi Amanah Parak Panjang	Napar	29 April 2012	200.000.000	6.112.000	Lancar

25.	Koperasi Bina Bersama	Kaning Bukit	7 Mei 2012	200.000.000	6.112.000	Lancar
26.	KSU Bina Usaha	Padang Tinggi	20 Juli 2012	100.000.000	3.556.000	Lancar
Total					Rp. 4.278.854.600	

Sumber: Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Fasilitasi Pembiayaan Kota Payakumbuh

Berdasarkan data pada tabel di atas, terlihat bahwa pada tahun 2013 tercatat sebanyak 26 koperasi sebagai peminjam dana bergulir penguatan permodalan. Dari 26 koperasi tersebut, 18 koperasi tercatat sebagai peminjam yang macet dalam mengembalikan pinjaman, dan hanya 8 koperasi yang lancar dalam mengembalikan pinjamannya. Total dana yang telah digulirkan UPTD Fasilitasi Pembiayaan Kota Payakumbuh untuk 18 koperasi yang bermasalah tersebut adalah sebesar Rp. 2.903.854.600. jika kita bandingkan jumlah dana yang telah dikeluarkan oleh UPTD dengan jumlah dana pada koperasi yang macet, dengan kata lain terdapat 69,1% koperasi mengalami permasalahan dalam mengembalikan pinjaman atau yang disebut macet.

Jika dilihat dari persentase jumlah koperasi yang bermasalah, hal tersebut dapat mempengaruhi tujuan awal dari program penguatan permodalan itu sendiri. Banyaknya koperasi yang bermasalah, dapat membuat sulitnya mencapai tujuan awal dari program yang telah ditetapkan oleh pengambil kebijakan.

Permasalahan yang terjadi di Kota Payakumbuh tersebut, khususnya dalam pelaksanaan penguatan permodalan KUMKM harus diperbaiki agar tujuan pemerintah untuk memberdayakan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul **"Evaluasi Pelaksanaan Penguatan Permodalan Koperasi di Kota Payakumbuh".**

B. Batasan Masalah

Uraian pada latar belakang di atas menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan program bantuan dana penguatan permodalan di Kota Payakumbuh masih mengalami permasalahan, yaitu masih terdapat peminjam yang mengembalikan pinjaman tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh UPTD Fasilitasi Pembiayaan Kota Payakumbuh. Bertitik tolak pada latar belakang masalah di atas agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan yang diharapkan, maka penelitian ini dibatasi dengan pelaksanaan penguatan permodalan koperasi pada tahun 2013 di Kota Payakumbuh.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

(1) Bagaimana evaluasi pemanfaatan program bantuan penguatan permodalan oleh koperasi di Kota Payakumbuh?

(2) Bagaimana evaluasi pengembalian pinjaman dana bergulir penguatan permodalan oleh koperasi di Kota Payakumbuh?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

(1) Untuk menjelaskan evaluasi pemanfaatan program bantuan dana penguatan permodalan oleh koperasi di Kota Payakumbuh.

(2) Untuk menjelaskan evaluasi pengembalian pinjaman dana penguatan permodalan oleh koperasi di Kota Payakumbuh.

E. Manfaat Penelitian

(1) Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan sumbangan bagi ilmu pengetahuan, sehingga penelitian ini bisa digunakan sebagai masukan untuk berbagai organisasi dalam memperbaiki sistem-sistem yang ada.

(2) Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengambil kebijakan ataupun instansi terkait untuk melaksanakan penyempurnaan program pemberdayaan masyarakat.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Evaluasi program

a. Pengertian Evaluasi Program

Suchman (1961, dalam Anderson 1975:1) memandang evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Definisi lain dikemukakan oleh Worthen dan Sanders (1973, dalam Anderson 1971:1). Dua ahli tersebut mengatakan bahwa evaluasi adalah kegiatan mencari sesuatu yang berharga tentang sesuatu, dalam mencari sesuatu tersebut juga termasuk mencari informasi yang bermanfaat dalam menilai keberadaan suatu program, produksi, prosedur, serta alternatif strategi yang diajukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan.

Evaluasi program merupakan upaya untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan suatu kebijakan secara cermat dengan cara mengetahui efektivitas masing-masing komponennya. Menurut Ralph Tyler, evaluasi program adalah proses untuk mengetahui apakah tujuan pendidikan sudah dapat terealisasikan (Tyler, 1950). Sedangkan, menurut ahli evaluasi yaitu Cronbach (1963) dan Stufflebeam (1971) evaluasi program adalah upaya menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan. Evaluasi program adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program. Evaluasi program dimaksudkan untuk melihat pencapaian target program. Untuk

menentukan seberapa jauh target program sudah tercapai, yang dijadikan tolak ukur adalah tujuan yang sudah dirumuskan dalam tahap perencanaan kegiatan (Arikunto, 2012:325-326).

Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan evaluasi program adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya suatu program pemerintah yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif atau pilihan yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan.

b. Tujuan Evaluasi Program

Menurut Suharsimi Arikunto (2004:13) tujuan diadakannya evaluasi program adalah untuk mengetahui pencapaian tujuan program dengan langkah mengetahui keterlaksanaan kegiatan program. Ada dua macam tujuan evaluasi, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum diarahkan pada program secara keseluruhan, sedangkan tujuan khusus diarahkan pada masing-masing komponen dari program tersebut.

c. Manfaat Evaluasi Pogram

Manfaat dengan adanya evaluasi program yaitu untuk mengadakan peninjauan terhadap suatu program (Suharsimi Arikunto, 2009:21). Hasil dari suatu evaluasi program dapat digunakan bagi pengambilan keputusan dan kebijakan lanjutan bagi suatu program.

d. Jenis Evaluasi Program

Menurut Farida Yusuf Tayibnapis (dalam Jhon Sumiharjo, 2008:15), secara umum evaluasi dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu :

1. Evaluasi pada tahap perencanaan

   Kata " evaluasi" sering digunakan dalam tahap perencanaan dalam rangka mencoba memilih dan menentukan skala prioritas terhadap berbagai alternatif dan kemungkinan terhadap cara mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk itu diperlukan berbagai teknik yang dapat dipakai oleh perencana. Satu hal yang patut dipertimbangkan dalam kaitan ini adalah bahwa metode-metode yang ditempuh dalam pemilihan prioritas tidak selalu sama untuk setiap keadaan, melainkan berbeda menurut hakekat dari permasalahannya sendiri.

2. Evaluasi pada tahap pelaksanaan

   Pada tahap ini, evaluasi adalah suatu kegiatan melakukan analisa untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan dibanding dengan rencana. Terdapat perbedaan antara evaluasi menurut pengertian ini dengan monitoring/pengendalian. Monitoring menganggap bahwa tujuan yang ingin dicapai sudah tepat dan bahwa proyek tersebut direncanakan untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Monitoring melihat apakah pelaksanaan proyek sudah sesuai dengan rencana dan bahwa rencana tersebut sudah tepat untuk mencapai tujuan. Sedangkan evaluasi melihat sejauh mana proyek masih tetap dapat mencapai tujuannya, apakah tujuan tersebut sudah berubah, apakah pencapaian hasil proyek tersebut akan memecahkan masalah pembangunan yang ingin dipecahkan.

Evaluasi juga mempertimbangkan faktor-faktor luar yang mempengaruhi keberhasilan proyek tersebut, baik membantu atau menghambat.

3. Evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan

Pengertian evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan hampir sama dengan pengertian pada tahap pelaksanaan, hanya perbedaannya yang dinilai dan dianalisa bukan lagi tingkat kemajuan pelaksanaan dibanding rencana, tetapi hasil pelaksanaan dibanding dengan rencana yakni apakah dampak yang dihasilkan oleh pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

e. Langkah-langkah Evaluasi Program

Menurut Farida Yusuf Tayibnapis (dalam Etika Safirna, 2011:29) dalam melaksanakan evaluasi program, maka dapat ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Langkah pertama dalam evaluasi adalah pahami program yang akan dievaluasi. Untuk dapat memahami program dengan baik, perhatian haruslah ditujukan kepada semua unsur program yang meliputi:
    a. Latar belakang dilaksanakannya program.
    b. Masalah yang mendasari lahirnya program.
    c. Tujuan yang ingin dicapai oleh program.
    d. Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan program.
    e. Organisasi dan tenaga pelaksanaan program.

f. Sumberdaya yang dipergunakan oleh program.

g. Waktu dan pertahapan program.

h. Tolak ukur, kriteria keberhasilan dan rencana evaluasi program.

2. Tentukan macam dan ruang lingkup evaluasi yang akan dilakukan.
3. Susunlah rencana evaluasi.
4. Pelaksanaan evaluasi.
5. Menarik kesimpulan.
6. Menyusun saran-saran untuk program yang telah dievaluasi.

B. Teori Mentalitas

Koentjaraningrat mengatakan bahwa 84% penduduk Indonesia adalah orang desa yang bermentalitas petani. Sedangkan, sisanya 16% adalah orang kota yang bermentalitas pegawai (priyayi). Sikap mental petani yang utama adalah sikap "subsistens" artinya bagi petani itu, orang bekerja adalah untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidup. Kalau kebutuhan hidup telah terpenuhi maka orang tidak perlu kerja keras lagi. Sementara itu, mereka yang bermentalitas pegawai menganggap bahwa tujuan dari bekerja adalah untuk mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan itu terwujud dalam kedudukan yang tinggi, kekuasaan, pemilikan lambang-lambang kekayaan, seperti rumah megah, pakaian mewah, mobil mentereng, dan sebagainya (Marzali, 2009:133).

Kedua bentuk sikap mental ini tidak mendorong pembangunan. Karena tidak mendorong untuk bekerja keras meningkatkan mutu kehidupan

materialnya. Sikap mental yang baik adalah kalau orang itu bekerja dengan tujuan untuk mencari mutu, yaitu untuk meningkatkan kualitas dari hasil pekerjaannya. Kelemahan-kelemahan mentalitas masyarakat Indonesia untuk pembangunan, perlu dibedakan antara dua hal, yaitu: (1) konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan dan sikap mental terhadap lingkungan kita, yang sudah lama mengendap dalam alam pikiran kita, karena terpengaruh atau bersumber kepada sistem nilai-budaya kita sejak beberapa generasi yang lalu, dan (2) konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan dan sikap mental terhadap lingkungan kita yang baru timbul sejak zaman revolusi, dan yang sebenarnya tidak bersumber pada sistem nilai-budaya kita (Koentjaraningrat, 2004:37-38).

Sikap mental petani Indonesia dalam aspek waktu (MW) adalah sangat terbatas. Orientasi hidup petani di pedesaan ditentukan oleh keadaan masa kini, petani hidup bekerja untuk mencukupi hidup hari ini. Kalau kebutuhan hidup hari ini sudah terpenuhi, maka orang tidak perlu lagi bekerja keras. Sebaliknya, mentalitas pegawai (priyayi) dalam aspek waktu banyak ditentukan oleh masa lampau. Orang priyayi selalu mengenang masa lampau yang jaya, masa lampau yang tentram dan sebagainya. Kedua jenis orientasi hidup di atas tidak cocok untuk pembangunan. Sikap mental yang baik adalah sikap yang berorientasi ke masa depan. Orang harus melihat ke depan merencanakan hidup dengan baik.

Sikap mental petani Indonesia terhadap alam (MA) yaitu pada umumnya menyelaras. Hidup harus sesuai dengan kehendak alam, jangan

berlaku gegabah terhadap alam, jangan mengeksploitasi alam semaunya sendiri. Sementara orang priyayi bersikap menggantung diri kepada nasib, mereka suka merenung memikirkan nasib, yang sewaktu-waktu mungkin baik dan di waktu lain mungkin tidak baik.

Selanjutnya pada aspek hubungan sosial, yaitu hubungan antara sesama manusia (MM), petani Indonesia pada umumnya menilai tinggi konsep sama-rata-sama-rasa. Di dunia ini manusia tidak hidup sendiri, tapi hidup saling membutuhkan satu sama lain. Selanjutnya sikap mental mengenai hakekat dari hidup dan karya manusia (MH-MK). Mentalitas petani tidak biasa berspekulasi tentang hakekat dari hidup, dari karya dan hasil karya manusia. Sedangkan menurut konsepsi orang priyayi, kebahagiaan-kebahagiaan itu adalah misalnya kedudukan, kekuasaan, dan lambang-lambang lahiriah dari kemakmuran.

C. Program Dana Bergulir Penguatan Permodalan KUMKM

1) Pengertian program dana bergulir penguatan permodalan

Dana bergulir penguatan permodalan menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No: 19/Per/M.KUKM/VIII/2006 yaitu dana yang berasal dari pemerintah untuk disalurkan dan digulirkan kepada KUMKM di kawasan industri dalam bentuk pinjaman melalui lembaga keuangan pelaksana. Sedangkan menurut peraturan Gubernur No 8 tahun 2007 tanggal 23 November 2007, pinjaman dana bergulir (Dana Penguatan Permodalan) adalah dana yang

bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat serta yang bersumber dari dana dekonsentrasi atau dana penguatan lainnya di Provinsi Sumatera Barat yang pengelolaannya diserahkan kepada daerah guna meningkatkan permodalan usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi di Sumatera Barat.

Berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 11 tahun 2013 dana bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja/Unit kerja BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) untuk kegiatan penguatan permodalan usaha bagi Koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah dan usaha lainnya. Menurut Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah No: 011/Per/LPDB/2011 dana bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Badan Layanan Umum untuk kegiatan penguatan modal usaha KUMKM dan usaha lainnya yang berada di bawah pembinaan Kementerian Negara/Lembaga.

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dana bergulir adalah dana milik pemerintah daerah yang bersumber dari APBD yang dialokasikan oleh Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja/Unit kerja BLUD (Badan Layanan Umum Daerah), untuk penguatan permodalan usaha mikro dan kecil. Dana ini disalurkan dalam bentuk pinjaman dan ditagih kembali untuk digulirkan kepada usaha mikro dan kecil lainnya yang membutuhkan.

2) Tujuan program dana bergulir penguatan permodalan

Program dana bergulir penguatan permodalan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi memiliki peranan yang sangat penting. Mengingat pentingnya progam pemberdayaan masyarakat, maka tujuan dari program tersebut harus tercapai. Adapun tujuan dari program dana bergulir penguatan permodalan ini menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM No. 19 tahun 2006 yaitu :

a) Mengembangkan dan mendorong KUMKM agar mampu bersaing dan dapat mengembangkan usahanya.
b) Memfasilitasi dan menstimulasi pengembangan pembiayaan KUMKM untuk modal kerja dan investasi.
c) Meningkatkan produktivitas dan jangkauan pemasaran KUMKM.
d) Membantu program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan dan pengangguran.

3) Sasaran penerima dana bergulir penguatan permodalan

Program penguatan permodalan memiliki ketentuan-ketentuan bagi calon penerima bantuan dana penguatan permodalan ini. Adapun sasaran penerima bantuan penguatan permodalan menurut Peraturan Walikota Payakumbuh No: 43 tahun 2013 yaitu usaha mikro dan kecil di Kota Payakumbuh yang bergerak pada usaha produktif meliputi: (1) usaha pertanian, peternakan, dan perikanan, (2) usaha perdagangan, (3) usaha industri kecil dan rumah tangga, (4) usaha jasa, (5) usaha ekonomi rakyat, dan (6) lembaga ekonomi mikro dan kecil lainnya.

4) Proses pemanfaatan dana bergulir penguatan permodalan

Menurut UU RI Nomor 20 tahun 2008, dana penguatan permodalan dimanfaatkan untuk: (1) memberdayakan usaha KUMKM agar mampu menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, (2) menumbuhkan iklim (kondisi) usaha yang dapat memberdayakan KUMKM, (3) menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing KUMKM, dan (4) mengembangkan dan memperkuat modal usaha KUMKM.

5) Proses pengembalian dana bergulir penguatan permodalan

Menurut Peraturan Walikota Payakumbuh No 43 tahun 2013, dana bergulir penguatan permodalan adalah dana pemerintah Kota Payakumbuh yang diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan pinjaman modal dan harus dikembalikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam naskah akad perjanjian pinjaman. Sesuai dengan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 43 tahun 2013 pasal 22 tentang pengembalian pinjaman, ditetapkan bahwa:

(1) Jangka waktu mengembalikan pinjaman minimal 6 (enam) bulan dan maksimal 24 (dua puluh empat) bulan untuk pinjaman perorangan yang nilai pinjamannya Rp. 10 juta ke bawah, dan maksimal 36 bulan untuk koperasi, kelompok dan perorangan yang nilai pinjamannya di atas Rp. 10 juta.

(2) Pengembalian dilakukan setiap bulan ke UPTD Fasilitasi Pembiayaan yang menerapkan PPK-BLUD Dana Bergulir Penguatan Modal Usaha Mikro di Kota Payakumbuh.

(3) Peminjam menyetor uang tunai melalui sub seksi penerimaan dengan membawa buku cicilan pembayaran;

(4) Sub seksi penerimaan memberikan kwitansi tanda bukti setoran dan mengisi buku cicilan;

(5) Penyetoran dikatakan sah apabila kwitansi dan buku cicilan dibubuhi paraf sub seksi penerimaan dan cap UPTD Fasilitasi Pembiayaan yang menerapkan PPK-BLUD (stempel).

D. Studi Relevan

Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rika Puspita Sari yang berjudul *"Peranan Bantuan Program Penguatan Modal Usaha Terhadap Usaha Pengolahan Pisang pada Kelompok Wanita Tani (KWT) Maju Bersama di Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar"*. Penelitian yang dilakukan oleh Rika Puspita Sari bertujuan untuk mendeskripsikan program penguatan modal usaha kelompok (PUMK) terhadap usaha pengolahan keripik pisang, membandingkan produksi dan keuntungan pada usaha pengolahan keripik pisang sebelum dan sesudah PUMK pada kelompok wanita tani maju bersama serta untuk melihat peranan program bantuan PUMK terhadap usaha pengolahan keripik pisang

dan mempelajari masalah-masalah yang dihadapi dalam usaha pengolahan keripik pisang.

Hasil penelitiannya menemukan bahwa bantuan Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) yang diberikan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura kepada KWT Maju Bersama secara bertahap mengalami kegagalan karena tanaman pisang banyak yang diserang penyakit. Selain itu, Permasalahan yang terjadi adalah sulitnya memperoleh bahan baku pisang, sehingga KWT Maju Bersama harus mencarinya sampai ke Payakumbuh. Di samping itu adalah kurang optimalnya tugas dari masing-masing anggota, sehingga tidak dapat menekan biaya produksi dan memaksimalkan keuntungan.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rika Puspita Sari, dalam penelitian ini penelitian bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program dana bergulir penguatan permodalan KUMKM yang berada di Kota Payakumbuh. Sedangkan, persamaan penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rika Puspita Sari yaitu sama-sama bertujuan untuk mendeskripsikan jalannya suatu program penguatan permodalan.

E. Kerangka Konseptual

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pemanfaatan dan pengembalian dana bergulir penguatan permodalan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Fasilitasi Pembiayaan Kota Payakumbuh untuk penguatan permodalan koperasi, usaha mikro dan kecil di Kota

Payakumbuh. Keterlaksanaan penguatan permodalan yang diteliti pada penelitian ini diantaranya adalah keterlaksanaan penguatan permodalan yang ditinjau dari aspek pemanfaatan dana penguatan permodalan, serta pengembalian pinjaman dana penguatan permodalan.

Secara ringkas penelitian ini dapat dilihat pada kerangka konsep sebagai berikut:

Gambar 1 : Kerangka Konseptual

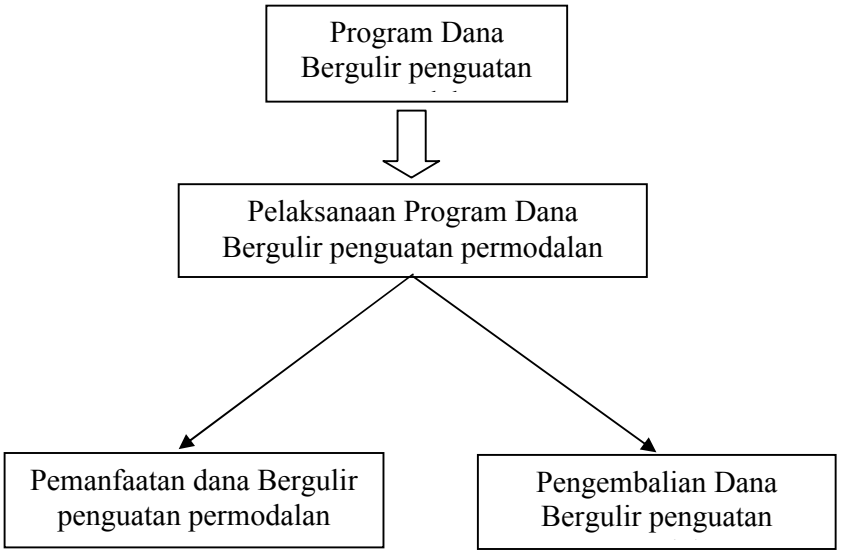

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa data dan juga hasil pengamatan langsung yang peneliti lakukan di lapangan, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Program dana bergulir penguatan permodalan di Kota Payakumbuh telah terlaksana sejak tahun 2002. Namun, selama pelaksanaannya program ini masih mengalami permasalahan. Seperti permasalahan pada saat pemanfaatan dan pengembalian pinjaman oleh koperasi peminjam.
2. Selama proses pemanfaatan pinjaman bantuan dana penguatan permodalan di Kota Payakumbuh, permasalahan-permasalahannya yaitu seperti berbedanya pemanfaat dana dengan penanggung jawab pinjaman kepada koperasi. Selain itu, banyaknya para peminjam yang memanfaatkan pinjaman tidak sesuai dengan aturan yang telah ada.
3. Selain pada proses pemanfaatan, program ini juga mengalami permasalahan pada proses pengembalian oleh peminjam kepada UPTD penanggung jawab. Pada saat mengembalikan pinjaman, masih banyak koperasi yang tergolong macet dalam mengembalikan pinjaman. Para peminjam tidak membayar cicilan

pinjamannya sesuai dengan waktu yan telah ditetapkan oleh UPTD Fasilitasi Pembiayaan Kota Payakumbuh.

4. Masyarakat dan UPTD Fasilitasi Pembiayaan Kota Payakumbuh yang ikut mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program ini, terlihat tidak serius menanggapi program pembangunan yang telah dicanangkan oleh pemerintah kota maupun pemerintah pusat.

B. Saran

ikBerdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berut:

1. Untuk kelancaran pembangunan melalui berbagai program yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sebaiknya masyarakat sebagai subjek pembangunan harus lebih berpartisipasi demi kelancaran pelaksanaan pembangunan tersebut.
2. Sebagai unit pelaksana program, sebaiknya UPTD Fasilitasi Pembiayaan Kota Payakumbuh lebih tegas dalam menindak lanjuti peminjam-peminjam yang bermasalah. Sehingga pencapaian tujuan program akan lebih mudah untuk dilaksanakan.
3. Secara Akademik, peneliti menyarankan agar ada penelitian berikutnya mengenai program Dana Bergulir Penguatan Permodalan ini. Karena program ini bukan saja bermasalah

dengan proses pemanfaatan dan pengembaliannya, tetapi juga pada proses penyaluran oleh UPTD penanggung jawab kepada koperasi calon peminjam.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. 2012. *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan.* Jakarta: Bumi Aksara

Arikunto, Suharsimi dan Abdul Jabar, Cepi Safrudin. 2004. *Evaluasi Program Pendidikan.* Jakarta: Bumi Aksara

----------. 2009. *Evaluasi Program Pendidikan.* Jakarta: Bumi Aksara

Etika Safirna. 2011. *Evaluasi Program Pengawasan Pestisida di Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci Tahun 2001. Skripsi* jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.

Hidayat. 2010. *Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Masjid di Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam.* Skripsi Jurusan Ilmu Sosial Politik Universitas Negeri Padang

http:// *www.suarapembaruan.com/...**pr*** {diakses tanggal 11 februari 2014}

http:// *www.te2n.com/tag/evaluasi-program* {diakses tanggal 26 februari 2014}

http:// h0404055.Wordpress.com {diakses tanggal 7 April 2014}

Iskandar.2013. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial.* Jakarta: Ciputat Mega Mall

Jhon Sumiharjo Hutabarat. 2008. *Evaluasi Pelaksanaan program pengembangan perumahan.* Skripsi jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Sumatera Utara {diakses tanggal 11 februari 2014}

Koentjaraningrat. 2004. *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Marzali, Amri. 2013. *Antropologi dan Pembangunan Indonesia.* Jakarta: Kencana

Miles, Matthew dan Hubberman, Michael A. 1992. *Analisis Data Kualitatif.* Jakarta: UI Press

Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* rev. ed. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 19/Per/M.KUKM/VIII/2006 tentang Perkuatan Permodalan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di Kawasan Industri.

Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana bergulir KUMKM Nomor 011/Per/LPDB/2011

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2007

Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2013

Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 43 Tahun 2008

Reka Azura. 2009. *Efektivitas PNPM-MP Terhadap Pemberdayaan Mayarakat Miskin di Nagari Kayu Tanam*. Skripsi Jurusan Ilmu Sosila Politik Universitas Negeri Padang

Rika Puspita Sari. 2011. *Peranan Bantuan Program Penguatan Modal Usaha Terhadap Usaha Pengolahan Pisang pada Kelompok Wanita Tani (KWT) Maju Bersama di Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar*. Skripsi jurusan Pertanian Universitas Andalas {diakses tanggal 11 Februari 2014}

Robby Maulana. 2010. *Pelaksanaan PNPM-MP dalam Kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan.* Skripsi Jurusan Ilmu Sosial Politik Universitas Negeri Padang

Setiadi, Elly M. dan Kolip, Usman.2011. *Pengantar Sosiologi.* Jakarta:Kencana

Subana. dkk. 2000. *Statistik Pendidikan.* Bandung : Pustaka Setia

Sugiyono.2008. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta

Tjiptoherijanto, Prijono. 1997. *Prospek Perekonomian Indonesia dalam Rangka Globalisasi*. Jakarta: PT Rineka Cipta

Umar, Husein.2011. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis.* Jakarta : Radjawali Press

UUD RI Nomor 20 tahun 2008

Yulia. 2010. *Efektivitas Pemberian DanaBergulir Kepada Pedagang Kaki Lima Oleh Badan Layanan Umum Daerah di Kota payakumbuh. Skripsi* jurusan Ilmu Sosial Politik Uiniversitas Negeri Padang

Yusuf. A.Muri. 2005. *Metodologi Penelitian.* Padang: UNP Press